

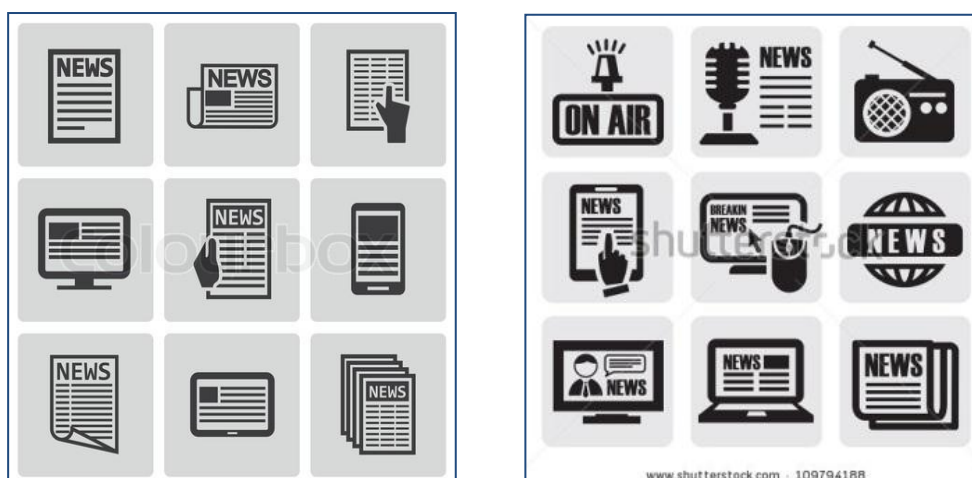


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Selasa, 31 May 2016



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2016**

Daftar Isi

1. PAKET KEBIJAKAN BELUM EFEKTIF (*Media Online Kompas*)
2. DAYA BELI MASYARAKAT MASIH LEMAH (*Media Online Kompas*)
3. BELEID BARU PERKAYA PASAR KEUANGAN (*Media Online Media Indonesia*)
4. DUNIA USAHA LOKOMOTIF PEMBANGUNAN EKONOMI (*Media Online Media Indonesia*)

KOMPAS

Selasa

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

31 May 2016

Paket Kebijakan Belum Efektif

Banyak Regulasi Masih Tumpang Tindih

JAKARTA, KOMPAS — Implementasi paket kebijakan ekonomi I-XII belum efektif.

Ketidakefektifan itu terbukti dari realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

Realisasi di sektor riil, tumpang tindih kebijakan, dan konsistensi regulasi menjadi penyebabnya.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Solusi Ekonomi Indonesia bertema "Evaluasi Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi I-XII", yang digelar Radio Pas FM dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Senin (30/5).

Pembicara dalam diskusi itu adalah Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi, Direktur Indef Enny Sri Hartati, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, serta Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot.

Enny mengatakan, selama 2015, komitmen dan persetujuan investasi melalui BKPM sebesar Rp 1.852 triliun atau tumbuh 45 persen secara tahunan (yoy). Na-

mun, realisasi investasi hanya sebesar Rp 545,4 triliun atau tumbuh 17,8 persen (yoy).

Hal itu menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti dari sisi kinerja investasi. Padahal, hampir semua paket kebijakan ekonomi tersebut bertujuan mendorong peningkatan investasi, terutama di sektor industri padat karya.

"Di sisi lain, pelemahan ekonomi masih belum dapat diatasi. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 hanya 4,92 persen atau lebih rendah daripada triwulan IV-2014. Hal ini juga bisa menjadi indikator belum efektifnya paket kebijakan tersebut," tuturnya.

Menurut Enny, paket kebijakan belum efektif karena realisasi dan implementasi paket itu masih lemah. Banyak regulasi yang masih tumpang tindih dalam be-

lum diharmonisasikan dengan baik.

Selain itu, koordinasi antar-kementerian teknis serta antara pemerintah pusat dan daerah masih belum baik. "Untuk itu, pemerintah harus fokus pada satu sektor, misalnya peningkatan daya saing industri yang dibarengi dengan peningkatan konsumsi masyarakat," kata Enny.

Anton menyatakan, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan konsistensi kebijakan pemerintah. Di samping itu, paket kebijakan tersebut tidak disertai dengan rancangan utama atau pembangunan industri nasional.

Belum optimal

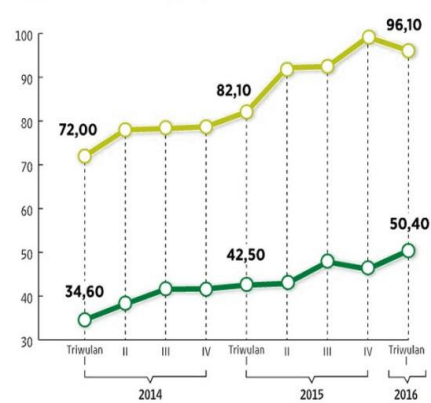
Edy mengakui implementasi paket kebijakan ke sektor riil memang belum optimal. Ke depan pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan untuk membangun industri nasional.

Kementerian Koordinator Perekonomian tengah membuat rancangan utama pengembangan industri elektronik, kimia, dan besi-baja. Ketiga industri tersebut akan menjadi industri unggulan Indonesia.

"Kami juga akan mengarahkan

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI (TRILIUN RUPIAH)

— Penanaman modal dalam negeri (PMDN)
— Penanaman modal asing (PMA)



Sumber: Litbang "Kompas"/ARM, disarikan dari BKPM

INFOGRAFIC: ARDIANSYAH

pengembangan industri manufaktur pengganti industri manufaktur di Tiongkok yang mulai menurun," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPM

Franky Sibarani memberikan penghargaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terbaik di sembilan daerah.

(MED/HEN/FER/C06)

Implementasi paket kebijakan ekonomi I-XII belum efektif. Ketidakefektifan itu terbukti dari realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Realisasi di sektor riil, tumpang tindih kebijakan, dan konsistensi regulasi menjadi penyebabnya. Hal tersebut mengemuka dalam komitmen dan persetujuan investasi melalui BKPM sebesar Rp 1.852 triliun atau tumbuh 45 persen secara tahunan (yoy). Namun, realisasi investasi hanya sebesar Rp 545,4 triliun atau tumbuh 17,8 persen (yoy). Hal itu menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti dari sisi kinerja investasi. Padahal, hampir semua paket kebijakan ekonomi tersebut bertujuan mendorong peningkatan investasi, terutama di sektor industri padat karya

Hashtag Berita :

#PaketKebijakanEkonomiNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #DayaBeliMasyarakat
#PertumbuhanEkonomiNasional #KementerianKoordinatorPerekonomian #Investasi
#KesejahteraanMasyarakat #BadanKoordinasiPenanamanModal

KOMPAS

Selasa AMANAT HATI NURANI RAKYAT 31 May 2016

PEREKONOMIAN

Daya Beli Masyarakat Masih Lemah

JAKARTA, KOMPAS – Bank Indonesia melihat stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I-2016 masih terjaga. Namun, pasar keuangan di sektor korporasi dan konsumsi rumah tangga masih tertekan sehingga perlu diperhatikan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan hal itu dalam peluncuran buku BI berjudul *Kajian Stabilitas Keuangan Maret 2016*, di Jakarta, Senin (30/5). Buku ini mengulas mitigasi risiko sistemis guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong intermediasi perbankan di tengah tantangan global dan domestik.

Agus mengatakan, sektor rumah tangga masih menunjukkan tren melambat. Konsumsi rumah tangga masih lemah kendati optimistis terhadap lapangan pekerjaan yang terbuka.

Sektor korporasi juga melambat. Permintaan kredit sektor ini masih lemah dan rasio kredit bermasalah (NPL) meningkat. Hal ini sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat dan permintaan global.

"Pelemahan kinerja korporasi merambat ke ruang fiskal pemerintah. Pendapatan di sektor pajak menjadi turun," ujarnya.

Berdasarkan data BI, kinerja perusahaan melambat di 2015 dan masih berlangsung hingga triwulan I-2016. Di sektor korporasi, terjadi pemburukan kredit dengan kategori kolektabilitas 2 di 31 bank besar.

Kredit korporasi dikategorikan kolektabilitas 2 atau dalam perhatian khusus jika ada tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari. Semakin besar tingkat kolektabilitas kredit, masalah kredit semakin besar. Kredit dikatakan macet jika dikategorikan kolektabilitas 5.

Data BI menunjukkan, kredit kolektabilitas 2 terus meningkat. Potensi kredit kategori ini berpindah menjadi NPL meningkat, khususnya di sektor pengangkutan dan pertambangan. Selain itu, secara umum, pertumbuhan kredit masih lambat, yaitu 8,71 persen dalam setahun.

Menurut Agus, BI merespons situasi itu dengan kebijakan makroprudensial yang terukur dan terintegrasi dengan kebijakan di bidang moneter dan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial yang telah dikeluarkan BI adalah rasio pinjaman terhadap nilai aset (*loan to value ratio/ LTV*) pada kredit properti, penetapan besaran uang muka pada kredit kendaraan bermotor.

"Kami menilai kebijakan itu mampu meredam potensi risiko sistem keuangan. Kebijakan itu akan terus dicermati dan disesuaikan dengan dinamika keuangan nasional," katanya.

Daya beli

Daya beli masyarakat diyakini meningkat saat lapangan kerja yang tercipta semakin banyak. Terkait hal ini, dunia usaha meminta pemerintah fokus mendorong pertumbuhan investasi di beragam sektor.

"Masuknya investasi akan berdampak besar bagi pertumbuhan sektor industri," kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat, kemarin.

Ade mengatakan, masuknya investasi diyakini menjadi dorongan berarti bagi pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi pada 2016 sehingga diproyeksikan tumbuh di atas 2 persen.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia Fajar Budiono menuturkan, investasi bidang petrokimia akan tumbuh pesat apabila didukung pasokan bahan baku, kesiapan lahan, dan insentif fiskal. (HEN/CAS)

Pemerintah melalui Bank Indonesia melihat stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I-2016 masih terjaga. Namun, pasar keuangan di sektor korporasi dan konsumsi rumah tangga masih tertekan sehingga perlu diperhatikan. Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengatakan dalam mitigasi risiko sistemis guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong intermediasi perbankan di tengah tantangan global dan domestik. Namun, sektor rumah tangga masih menunjukkan tren melambat dan Konsumsi rumah tangga masih lemah kendati optimistis terhadap lapangan pekerjaan yang terbuka, Selain itu Sektor korporasi juga melambat. Permintaan kredit sektor ini masih lemah dan rasio kredit bermasalah (NPL) meningkat. Hal ini sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat dan permintaan global

Hashtag Berita :

#StabilitasEkonomiIndonesia #PaketKebijakanEkonomiNasional #DayaBeliMasyarakat
 #KesejahteraanMasyarakat #BankIndonesia #Inflasi #PenanamanModalDalamNegeri
 #PertumbuhanEkonomiNasional



Selasa, 30 May 2016

Beleid Baru Perkaya Pasar Keuangan

Walau ada sedikit tekanan, otoritas moneter menilai stabilitas sistem keuangan tetap terjaga baik di kuartal II ini.

ANASTASIA ARVIANTI

UNTUK memperkaya varian instrumen keuangan oleh pelaku pasar, khususnya perbankan, Bank Indonesia (BI) tengah menyusun regulasi yang diestimasi bakal terbit pada Agustus 2016. Hal itu disampaikan Gubernur BI Agus DW Martowardojo di sela peluncuran buku *Kajian Stabilitas Keuangan* edisi Maret 2016, di Gedung BI, Jakarta, kemarin.

Agus mengungkapkan, peraturan Bank Indonesia (PBI) itu merupakan regulasi yang sudah lama perlu diwujudkan demi mengelola pasar uang, pasar rupiah, dan valuta asing. Nantinya, perbankan akan diminta menjadi pemain utama dan diperkenankan melakukan transaksi dengan bank sentral. "Regulasi ini akan meningkatkan manajemen risiko dalam bertransaksi, sekaligus menegaskan kewenangan BI dalam mengatur transaksi pasar uang dan pasar valuta asing," ujarnya.

Selain itu, dalam PBI tentang pasar uang tersebut sangat dimungkinkan ada instrumen-instrumen pasar yang dikeluarkan korporasi nonbank. Diharapkan, bentuk instrumen yang terbit nanti ialah seperti *commercial paper*, surat utang jangka menengah (*medium term notes*/MTN), *negotiable certificate of deposit* (NCD), dan obligasi atau sukuk, yang bisa diperdagangkan di pasar uang.

"Sehingga menambah portofolio instrumen, selain dari perbankan ataupun yang dikeluarkan bank sentral, tapi juga dari korporasi nonbank," tambah Agus.

Menurutnya, draf aturan itu sudah disetujui seluruh Dewan Gubernur BI dan sedang dalam proses finalisasi. Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan tepatnya regulasi itu diterbitkan. "Tapi mungkin sebelum akhir Agustus sudah bisa keluar," tandasnya.

Sebelumnya, Bank Sentral mendorong korporasi BUMN untuk lebih aktif dalam meny-

Pasar Obligasi

	2015	2016
■ Obligasi dan sukuk pemerintah	Rp375,06 triliun	Rp206,50 triliun
■ Obligasi korporasi	Rp311,79 triliun	Rp184,46 triliun
■ Sukuk korporasi	Rp3,27 triliun	0,0

Perdagangan Obligasi Korporasi

	Outstanding (Rp juta)	Volume (juta)	Frekuensi
■ 2011	146.968.585	126.387.596	18,078
■ 2012	187.461.100	160.117.793	25,301
■ 2013	218.219.600	185.718.893	19,989
■ 2014	223.463.600	167.674.457	22,153
■ 2015	249.879.900	187.655.445	22,279
■ 2016	256.668.150	64.489.123	7,784
● Jan	248.199.900	12.646.520	1,830
● Feb	253.417.150	20.580.647	1,929
● Mar	253.923.150	16.674.911	2,090
● Apr	256.668.150	14.587,045	1,935



Perbandingan Nilai Pasar Obligasi Korporasi terhadap PDB

Myanmar	41,5%
Singapura	32,4%
Thailand	17,4%
Filipina	5,8%
Indonesia	2,2%

■ Nilai pasar obligasi korporasi (2015): 2,2% terhadap PDB
■ Nilai ideal (2030): 17% terhadap PDB
Sumber: ICB&FOTODOKS

rap pendanaan melalui penerbitan obligasi di pasar uang. Selain menambah kedalaman pasar, tujuan lain ialah menampung dana hasil repatriasi andai kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) jadi diterapkan pada semester kedua tahun ini.

Berdasarkan data BI, hingga 2015, korporasi, baik perbankan maupun nonperbankan Indonesia, masih sangat minim dalam menerbitkan obligasi. Hingga 2015, nilai pasar obligasi korporasi di Indonesia hanya 2,2% dari produk domestik bruto. BI melihat idealnya nilai pasar obligasi korporasi dapat mencapai 17% terhadap PDB pada 2030.

Kepercayaan

Pengamat pasar uang, Farial Anwar, melihat peluang untuk berbagi beban moneter dengan adanya PBI baru tersebut. Namun, kata dia, tantangannya nanti ialah bagaimana menumbuhkan kepercayaan investor pasar uang yang selama ini terbiasa dengan instrumen keluaran BI.

"Saling percaya di perbankan itu penting sehingga beban bunga BI tidak terlalu besar. Beban moneter tidak terlalu berat. Kalau bisa diterapkan ke tempat lain kan mengurangi beban. Seperti di negara lain pasar uangnya dalam dan beragam," kata Farial saat dihubungi, kemarin.

Farial mengatakan, selama ini transaksi pasar uang didominasi instrumen keluaran BI, pun pemerintah, sebab risikonya lebih kecil ketimbang produk swasta, bahkan cenderung *zero risk*. (*Ant/Fat/E-2*)

arvianti@mediaindonesia.com

Dalam memperkaya varian instrumen keuangan oleh pelaku pasar, khususnya perbankan, Bank Indonesia (BI) tengah menyusun regulasi yang diestimasi bakal terbit pada Agustus 2016 peraturan Bank Indonesia (PBI) itu merupakan regulasi yang sudah lama perlu diwujudkan demi mengelola pasar uang, pasar rupiah, dan valuta asing. Nantinya, perbankan akan diminta menjadi pemain utama dan diperkenankan melakukan transaksi dengan bank sentral. "Regulasi ini akan meningkatkan manajemen risiko dalam bertransaksi, sekaligus menegaskan kewenangan BI dalam mengatur transaksi pasar uang dan pasar valuta asing Selain itu, dalam PBI tentang pasar uang tersebut sangat dimungkinkan ada instrumen-instrumen pasar yang dikeluarkan korporasi nonbank

Hashtag Berita :

#StabilitasEkonomiIndonesia #ValutaAsing #MoneterKeuanganNegara #BursaSaham/Efek #PertumbuhanEkonomiNasional #BankIndonesia #EkonomiGlobal #Investasi #Inflasi

Dunia Usaha Lokomotif Pembangunan Ekonomi

DUNIA usaha diibaratkan sebagai lokomotif yang membawa gerbong pemerintahan. Karena itu, dunia usaha semestinya mampu mengakselerasi proses pembangunan negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh kepada media dalam acara pertemuan pengusaha Tionghoa bertajuk Lebih Akrab Bersama Bang Surya, di Hotel Raffles, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dunia usaha mesti terus bergerak untuk memajukan perekonomian negara. Sebab, awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dimulai dengan defisit transaksi berjalan yang tinggi sehingga menyebabkan defisit APBN.

"Tidak mudah memulai pemerintahan yang diwarisi dengan defisit, ditambah dengan dukungan parlemen yang minoritas pada awalnya," ujarnya.

Surya pun mengimbau dunia usaha terus maju bersama untuk menjadi penggerak roda ekonomi negara.

Di sisi lain, meski kondisi makroekonomi sudah mulai menunjukkan perbaikan, ia tak menampik kondisi perekonomian global masih menjadi penghambat dunia usaha. Kondisi mikroekonomi disebutnya juga belum sepenuhnya pulih, ditunjukkan dengan sektor riil yang belum benar-benar bangkit.

"Ini menjadi tugas dan pekerjaan rumah kita bersama. Saya apresiasi langkah-langkah pemerintah dalam paket-paket kebijakan untuk membangkitkan kembali perekonomian kita," pungkas Surya.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Maxi Gunawan menambahkan, agar sektor riil bisa kembali bangkit, pola pikir yang ada saat ini mesti diubah. Menurutnya, produksi dan kualitas dalam negeri mesti ditingkatkan agar Indonesia tidak lagi mengeksport barang mentah, tapi barang yang sudah memiliki nilai tambah. (Arv/E-1)

DUNIA USAHA LOKOMOTIF PEMBANGUNAN EKONOMI

Dunia usaha diibaratkan sebagai lokomotif yang membawa gerbong ekonomi pemerintahan. Karena itu, dunia usaha semestinya mampu mengakselerasi proses pembangunan negara dan dunia usaha mesti terus bergerak untuk memajukan perekonomian negara. Sebab, awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dimulai dengan defisit transaksi berjalan yang tinggi sehingga menyebabkan defisit APBN

Hashtag Berita :

#PertumbuhanEkonomiNasional
#KawasanEkonomiKhusus
#DuniaUsaha #EKonomiGlobal
#KamarDagangIndonesia
#KesempatanKerja
#PelaksanaanProgramNasional
#PaketKebijakanEkonomiNasional